

### BAB III

#### KONSTELASI POLITIK INTERNASIONAL DALAM KONFLIK SURIAH

Konflik yang terjadi di Suriah sesungguhnya membentuk dua blok besar yang di topang oleh beberapa Negara, blok Assad yang di topang oleh Russia, Iran dan China Sedangkan blok pemberontak yang di topang oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Arab Saudi dan Turki, blok Assad sesungguhnya menginginkan rezim agar tetap bercokol pada tabuk kepemimpinan yang berarti memilih *status quo* sedangkan blok pemberontak dengan tuntutan menurunkan rezim Bashar Al Assad, dari sini kita dapat memetakan konflik yang terjadi di Suriah secara komprehensif dengan melihat sebab-sebab konflik yang terjadi kemudian actor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut dan terakhir penyelesaian atau resolusi konflik yang telah dilakukan oleh umat islam.

##### A. Sebab-sebab terjadinya konflik di Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah sesungguhnya merupakan akumulasi dari klimaks konflik yang telah berkepanjangan yang di tandai dengan tuntutan- tuntutan warga sipil untuk segera mencabut undang-undang darurat yang telah menghambat kehidupan negara, dan menghalangi kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. tuntutan para pendemonstran juga menunggu pemutihan dan pembebasan semua tahanan politik, sehingga seluruh rakyat dapat hidup dengan tenang namun kemudian tidak di indahkan oleh pemerintah sehingga berlanjut pada konflik yang semakin besar yang menewaskan banyak korban yang berjatuhan karena para demonstran yang

intens dalam berunjuk rasa.

Akumulasi dari korban-korban yang berjatuhan kemudian menimbulkan tuntutan gerakan menurunkan rezim yang berkuasa Bashar Al-Assad, hal ini di picu oleh kekerasan dan penangkapan yang di lakukan oleh militer Suriah terhadap para demonstran yang menuntut pembebasan politik dan reformasi politik yang di telah di bekukan oleh pihak yang berkuasa di Suriah yakni partai Ba'ath, hal ini kemudian mendapat respon keras dari militer Suriah yang kemudian menjadikan konflik semakin besar, lebih dari 20 demonstran telah ditangkap di ibu kota Damaskus pada hari kedua demonstrasi yang jarang terjadi karena dilarang menurut undang-undang darurat Suriah yang telah diberlakukan sejak 1963, hal ini membuat kondisi semakin tidak terkendali dan mencuat unjuk rasa di berbagai kota di antaranya Dara'a, Aleppo, Damaskus dan yang lainnya.

Konflik yang terjadi di Suriah kemudian di tengarai merupakan konflik yang berbau ideology yakni antara aliran agama Syiah dan Sunni di mana presiden Bashar Al-Assad yang berafiliasi pada aliran Syiah Alawi menimbulkan berbagai macam kecurigaan dan *opini public* yang cenderung menjerumuskan konflik pada tataran aliran keagamaan alhasil konflik yang pada awalnya berorientasi politik bertransformasi menjadi konflik aliran keagamaan antara Syiah dan muslim Sunni namun konflik yang terjadi di Suriah jika di lihat dari penyebab utama konflik dan akar permasalahannya sesungguhnya bukanlah konflik yang bernuansa agama namun karena rezim penguasa Bashar Al-Assad tidak mengambil kebijakan untuk meredam para demonstrasi yang berunjuk rasa di berbagai kota sehingga konflik tersebut di manfaatkan oleh berbagai pihak untuk mendapat kekuatan yang besar dengan motif aliran keagamaan antara Syiah dan Sunni.

Puluhan keluarga para tawanan politik berdemonstrasi untuk meminta pembebasan mereka sehari setelah sekitar 200 orang turun ke jalan untuk meminta keleluasaan dan kebebasan politik. "Bebaskan tawanan," para demonstran bernyanyi di Lapangan Marjeh di Damaskus pusat ketika beberapa aktivis hak asasi manusia bergabung dengan mereka, polisi dan agen-agen keamanan dalam pakaian sipil telah menjaring pengunjung rasa, dan empat demonstran muda ditangkap dan dibawa dengan cepat dengan mobil, Amnesty International mengatakan agen-agen keamanan berpakaian biasa telah memukuli beberapa demonstran dan menangkap sedikitnya 30 orang. wanita, anak-anak dan orang tua termasuk di antara mereka yang dipukul, menurut Amnesty.<sup>44</sup>

Pemberontakan Suriah 2011 hingga 2014 awal adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Ini adalah bagian dari Musim Semi Arab yang lebih luas, gelombang pergolakan di seluruh Dunia Arab. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjung rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath.

Pemerintah Suriah mengerahkan tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan "gerombolan bersenjata" untuk menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah.

---

<sup>44</sup> Djibbil Muhammad. *Pesan AS untuk Suriah saat menghadapi Demonstran*. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/17/170179-pesan-as-untuk-suriah-saat-menghadapi-demonstran>. di akses : Rabu, 15-01-2014

Para pemberontak bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, namun komponen sipil dari oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisir. pemberontakan memiliki nada sektarian, meskipun tidak faksi dalam konflik tersebut telah dijelaskan sektarianisme sebagai memainkan peran utama. Pihak oposisi didominasi oleh Muslim Sunni, sedangkan angka pemerintah terkemuka adalah Alawit Muslim Syiah. Assad dilaporkan didukung oleh Alawi dan paling banyak adalah orang Kristen di negara ini.

Demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintah Suriah terjadi di Aleppo pada tanggal 20 Juli 2012. Di bagian Aleppo Utara, Tentara Bebas Suriah (TBS) telah mengklaim kontrolnya atas beberapa kota dan distrik, diantaranya Tal Rifaat, Azaz dan Al-Bab. pertempuran dimulai saat puluhan pemberontak TBS menembus ke dalam kota Aleppo. Para warga kemudian mengecat dinding mereka dengan gambar bendera pra-Ba'athis untuk menyimbolkan revolusi, pertempuran Aleppo 2012, juga dikenal dengan sebutan "induk dari semua pertempuran" adalah konfrontasi militer yang terjadi di Aleppo, Suriah antara militer Suriah dengan Tentara Pembebasan Suriah. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 19 Juli 2012 sebagai bagian dari serangkaian Perang Sipil Suriah. Bentrokan berawal dengan dilancarkan serangan oleh Tentara Bebas Suriah terhadap kota Aleppo, dimana kota ini merupakan kota terbesar sekaligus pemegang kekuasaan dan pusat ekonomi strategis di Suriah.

Mayoritas kawasan di Aleppo yang dikuasai para pemberontak dibombardir oleh pasukan pemerintah dan pertempuran lainnya pecah di sejumlah distrik. Pertempuran terbaru ini berlangsung hanya beberapa saat setelah voting Majelis Umum PBB yang mengkritik soal kegagalan Dewan Keamanan untuk bertindak di Suriah. Pusat pertempuran berlangsung di sekitar kawasan selatan Damaskus dimana baku tembak dilaporkan berlangsung di Tadamon,

meski sebelumnya telah diserang oleh pasukan pemerintah. Pertempuran juga terjadi di sejumlah bagian di pusat ibukota, dan dilaporkan oleh BBC bahwa pertikaian berikutnya terjadi di bagian barat kota dan di sekitar Dumar.<sup>45</sup>

## **B. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Suriah**

Untuk dapat memahami berbagai macam actor yang terlibat dalam konflik Suriah maka harus dapat di petakan dengan baik pihak yang berada di blok penguasa Bashar Al-Assad dan blok yang berada di pihak pemberontak sehingga kemudian dapat di lihat aktifitas yang di jalankan oleh actor-aktor tersebut dengan motifnya masing-masing berikut akan di jelaskan beberapa actor yang mempunyai posisi yang sangat menentukan jalannya perdamaian di Suriah :

- **Pihak Rezim Pemerintahan Bashar Al-Assad**

Dapat di lihat secara spesifik seperti angkatan bersenjata Suriah, Garda Republik, Direktorat Keamanan Umum, Direktorat Keamanan Politik, *Shabiha*, *Jays Al-Sha'bi*, kemudian Iran dengan pengawal Revolusi Iran, *Basij*. Sementara kelompok asing di antaranya Hizbullah, PFLP-GC (Front Populer Pembebasan Palestina-komando umum), dan militant Syiah Iraq.<sup>46</sup>

- **Pihak Oposisi**

Sedangkan yang berada dalam blok oposisi seperti Koalisi Nasional Suriah terdiri dari tentara pembebasan Suriah yang di dukung oleh Turki, Qatar, Arab Saudi, selain itu ada Mujahidin yang terdiri dari Front Al Nusra, Akar Al-Sham, Ghuraba Al-Sham, yang di dukung

---

<sup>45</sup> Lihat pertempuran Aleppo 2012-2013. [http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran\\_Aleppo\\_2012-2013](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Aleppo_2012-2013). Di akses : Rabu,15-01-2014

<sup>46</sup> Perang saudara Suriah dalam : [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_saudara\\_Suriah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah) di akses : Sabtu,18-01-2014

oleh Qatar, Arab Saudi, dan Al-Qaeda di Iraq. Dan Partai Uni Demokrasi Kurdi yakni unit perlindungan populer, koalisi nasional untuk revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi (bahasa Arab: (هَيؤوسلأ قؤضرأ عملأؤ قروثلأ ءوقل ءن طولأ فآلئىآلأ), biasanya bernama Koalisi Nasional Suriah (bahasa Arab: (هَيؤوسلأ ءن طولأ فآلئىآلأ) adalah koalisi dari kelompok oposisi dalam Perang saudara Suriah yang didirikan di Doha, Qatar, pada bulan November 2012.

Mantan imam Masjid Umayyah di Damaskus, Moaz al-Khatib, dianggap sebagai orang yang moderat, terpilih sebagai presiden koalisi. Riad Seif dan Suheir Atassi, keduanya aktivis demokrasi terkemuka dan yang terakhir seorang feminis sekuler, terpilih menjadi wakil presiden. tujuan utama dari Koalisi Nasional adalah mengganti pemerintahan Bashar al-Assad, "simbol dan pilar dukungannya", "pembongkaran jasa keamanan", pemersatu dan mendukung Tentara Pembebasan Suriah, menolak dialog dan negosiasi dengan pemerintah al-Assad, dan "menuntut pertanggung jawaban atas pembunuhan, penghancuran di Suriah, dan pengusuran warga Suriah"<sup>47</sup>

- **Pihak Eksternal**

Dari perincian actor-aktor konflik yang di lihat di dalam negeri sesungguhnya dapat di bagi juga actor-aktor eksternal yang terlibat di dalam konflik Suriah sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya Negara-negara di kawasan regional maupun global yang ikut mendukung maupun menolak pihak-pihak yang berkonflik dengan motifnya masing-masing, secara umum dapat kita lihat dalam dua blok besar antara blok Assad yang di topang oleh Russia, China dan Iran Sedangkan blok oposisi yang di topang oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Arab Saudi, Turki dan Qatar.

<sup>47</sup> [http://www.kompas.com/kompas/suriah/koalisi-nasional-untuk-revolusi-suriah-dan-pasukan-oposisi/](#) (Online) di akses

Campur tangan Negara-negara asing dalam konflik Suriah sesungguhnya semakin menjadikan konflik di Suriah memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, hal ini di karenakan Negara-negara asing yang ikut campur dalam konflik di Suriah memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang sulit untuk di pertemukan, hal ini dapat di analisis melalui pernyataan sikap resmi dari masing-masing Negara dalam tragedy yang terjadi di Aleppo yang di sebut sebagai wilayah induknya konflik, berikut ini yang dapat di lihat sebagai berikut :

- Kementerian Luar Negeri Perancis mengatakan bahwa "dengan adanya penumpukan senjata berat di sekitar Aleppo, Presiden Suriah, Bashar al-Assad sedang bersiap untuk melakukan pembantaian pada rakyatnya sendiri", sementara Italia dan ketua Dewan Keamanan PBB juga menuduh pemerintah bersiap untuk membantai warga sipil.
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa "mitra Barat kami beserta beberapa negara tetangga Suriah pada dasarnya mendorong, mendukung dan mengarahkan perjuangan bersenjata untuk melawan rezim". Lavrov juga menambahkan bahwa akan lebih realistis jika Angkatan Bersenjata Suriah tidak melawan ketika pemberontak menduduki Aleppo. "bagaimana kalian bisa berharap bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah hanya akan berdamai dan berkata 'Baiklah, aku salah. Ayo, jatuhkan saya, dan ubahlah rezim?'"
- Turki - Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan mendesak tindakan internasional, dan mengatakan bahwa kita tidak mungkin "untuk tetap menjadi penonton" atas pertempuran di Aleppo. Reuters melaporkan bahwa Turki telah bersekutu dengan Arab Saudi dan Qatar untuk memberikan bantuan militer dan komunikasi kepada Tentara Bebas Suriah dengan mendirikan basis di kota Adana. Reuters juga mengutip satu sumber

yang berbasis di Doha yang menyatakan bahwa Turki, Qatar dan Arab Saudi telah memberikan bantuan senjata dan pelatihan kepada para pemberontak.

- Inggris - William Hague, Menteri Luar Negeri Inggris juga menyatakan bahwa "dunia harus bertindak untuk mencegah pembantaian di Aleppo."
- Amerika Serikat - Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan akan terjadinya pembantaian baru di Aleppo oleh pemerintah Suriah: "Kekhawatiran kami adalah bahwa kita akan melihat pembantaian di Aleppo dan itulah yang tampaknya dipersiapkan oleh rezim Assad."
- Sebelumnya, Rusia dan Cina mengesahkan resolusi PBB yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan mengatakan bahwa resolusi akan menghancurkan upaya perdamaian. Utusan Moskow di PBB, Vitaly Churkin, mengatakan bahwa resolusi PBB berpihak dan mendukung oposisi bersenjata. sedangkan negara barat memuji resolusi yang didukung 133 anggota, 12 menolak dan 31 negara absen. Resolusi itu sendiri mengkritik Dewan Keamanan PBB dan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Majelis memperdebatkan resolusi yang diajukan oleh Arab Saudi, sesaat setelah pengunduran diri utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan dan kegagalan rencana enam poin perdamaannya.
- Di sisi lain, media Iran pada tanggal 30 Juli melaporkan bahwa Pemerintah Iran meminta Turki dan Qatar agar membantu menjamin pembebasan 48 warga negara Iran yang diculik hari Sabtu di Damaskus. Iran mengatakan para korban adalah jemaah Shiah, tetapi komandan Tentara Bebas Suriah menggambarkan mereka sebagai pasukan elit Iran, Garda Revolusi. Atas hal ini bisa disimpulkan bahwa Iran mendukung pemerintah

Suriyah, sementara Turki dan Qatar mendukung oposisi Suriyah.<sup>48</sup>

Dari pemaparan pernyataan resmi beberapa Negara yang sangat massif dalam konflik Suriyah dapat memudahkan dalam memetakan actor-aktor yang terlibat konflik dalam afiliasinya terhadap pihak yang berkonflik namun hal ini dapat di redam dengan dasar satu tujuan yakni menciptakan perdamaian dunia sebagaimana yang di usung oleh Indonesia yang tidak memihak blok manapun namun aktif dalam pendirian politik untuk wacana negosiasi damai dan penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Suriyah hal ini yang kemudian menjadi agenda untuk mempertemukan pihak oposisi dan pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik secara damai dengan tuntutan masing-masing sehingga di harapkan menemukan titik temu yang saling menguntungkan.

Ajang untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik ini dapat di lihat pada perundingan atau konferensi Genewa I yang telah gagal di laksanakan di karenakan pihak oposisi tidak hadir dalam konferensi tersebut dan berlanjut pada konferensi damai Genewa II di Swiss yang di harapkan dapat berjalan dengan lancar pada 22 Januari nanti sehingga hasilnya tidak merugikan rakyat Suriyah khususnya warga sipil yang menjadi korban baik wanita maupun anak-anak dan pada umumnya masyarakat internasional

### **C. Penyelesaian konflik Suriyah oleh Umat islam**

Konflik yang terjadi di Suriyah merupakan konflik yang panjang dalam penyelesaiannya karena kerumitan dan kompleksitas actor yang terlibat di dalamnya sekaligus tiap tuntutan yang tanpa toleransi mengakibatkan banyak resolusi konflik yang mengalami kebuntuan namun

setidaknya ada upaya yang dilakukan dari berbagai pihak baik Negara maupun organisasi internasional, dalam konflik Suriah, penelitian ini mencoba melihat penyelesaian yang dilakukan oleh internal umat islam sendiri dalam hal ini yang mewakili atau merepresentasi negara-negara muslim di kawasan timur tengah salah satunya adalah Liga Arab, Organisasi internasional ini mempunyai 22 anggota di antaranya adalah Mesir, Irak, Yordania, Libanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Aljazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti dan Komoro, 3 Negara pemantau (observer country), yaitu : Eritrea, Venezuela, dan India.

Peran Liga Arab dalam konflik Suriah dapat dilihat dari pengiriman pasukan pemantau untuk mengamati perkembangan konflik, namun kemudian Liga Arab membekukan misi pemantau tersebut dan menarik mundur pasukannya. awal 2012, Liga Arab berencana mengirim pasukannya kembali dengan meminta bantuan kepada PBB dalam misi pemantauan gabungan PBB-Liga Arab, termasuk utusan khusus gabungan. pada bulan Maret 2013, diadakan pertemuan yang memutuskan bahwa negara anggota Liga Arab berhak memberikan bantuan, termasuk persenjataan, kepada warga Suriah untuk membela diri. mayoritas negara Liga Arab mendukung aksi internasional termasuk intervensi militer, Liga Arab telah mencoba melakukan pertemuan dengan tujuan negosiasi dan mediasi yang dihadiri oleh negara-negara anggota, tetapi dari Suriah hanya dihadiri oleh pihak oposisi. Liga Arab membekukan keanggotaan Suriah pada november 2011. Liga Arab juga memberlakukan sanksi ekonomi dan politik atas pemerintah Suriah dan memerintahkan anggotanya agar menarik duta besar mereka dari Damaskus.<sup>49</sup>

Negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan ke Suriah, menyusul dugaan penggunaan senjata kimia oleh

<sup>49</sup> <http://www.ipsi.com/uk/wahyuz76/liga-arab/> diakses : Sabtu

rezim Bashar al Assad. Resolusi tersebut disahkan oleh Liga Arab di Kairo, Mesir. Liga Arab mendesak PBB dan masyarakat internasional mengambil langkah pencegahan dan tindakan yang perlu terhadap rezim Assad. Para menteri luar negeri Liga Arab juga berpendapat mereka yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia itu harus diadili.

Menteri Luar Negeri Saudi, Saud al-Faisal mengatakan, kecaman terhadap Suriah atas serangan gas beracun, yang berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry telah menewaskan 1.429 orang, tidak cukup. Faisal juga menyatakan penentangan terhadap aksi militer ke Suriah dengan dalih tindakan tersebut merupakan intervensi asing, juga tak dapat diterima. Resolusi Liga Arab berjanji untuk "menyajikan segala bentuk dukungan bagi rakyat Suriah untuk membela diri"<sup>50</sup> usaha penyelesaian yang di lakukan oleh Liga Arab juga terdapat perbedaan pendapat dalam pengeluaran resolusi yang oleh beberapa Negara bersebrangan di antaranya adalah Iraq, Lebanon, Aljazair dan juga Mesir hal ini di karenakan internal Liga Arab sarat akan kepentingan masing-masing Negara.

Sejauh ini penyelesaian konflik Suriah yang di upayakan oleh Liga Arab belum menuntaskan permasalahan yang di hadapi Suriah, justru dapat meningkatkan eskalase konflik, karena konflik di Negara tersebut telah berkembang menjadi konflik antar mazhab yang sangat sensitive, di dalam internal Liga Arab sendiri terlihat kubu Pan Arabisme dan Pan Islamisme sehingga terkadang sulit menyatukan persepsi, solusi yang kemudian di tawarkan oleh negara-negara berpenduduk muslim sebagaimana Indonesia adalah dialog antar agama atau keyakinan guna menemukan titik terang bahwa islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan jauh dari gesekan kepentingan yang membuat umat islam terpecah belah sehingga sulit menciptakan perdamaian.

---

<sup>50</sup> Palupi. <http://internasional.kompas.com/read/2013/09/02/0427186/Liga.Arab.Keluarkan.Resolusi.soal.Suriah>. di akses : Minggu, 19-01-2014

#### **D. Upaya negosiasi damai Indonesia dalam konflik Suriah**

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Suriah memiliki kekhasan tersendiri dalam dinamika politik internasional yang cenderung meniru fenomena ala perang dingin, walaupun ada pengamat yang melihat Indonesia dalam kebijakannya terhadap konflik Suriah tidak jelas bahkan tidak mempunyai *political standing* dan pada analisa yang lain melihat presiden SBY sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan telah mengeluarkan pernyataan mendukung turunnya Bashar Al-Assad hal ini di nilai sebagai noda dalam etika diplomasi namun telah di koreksi pernyataan tersebut oleh juru bicara presiden.

Semua analisa tersebut dapat di terima jika memiliki bukti-bukti yang memadai dan valid dalam melihat kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Suriah, penelitian ini memperlihatkan bukti-bukti dan data yang valid bahwa Indonesia dalam kebijakannya terhadap konflik Suriah memiliki pendirian politik yang konsisten dalam bingkai keislaman terbukti dengan wacana yang di usung oleh Indonesia untuk menyelesaikan konflik Suriah dengan negosiasi damai yang di respon positive oleh masyarakat internasional, hal ini tidak terlepas dari rekomendasi dua organisasi islam raksasa di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU yang senantiasa mendesak pemerintah Indonesia untuk menggunakan upaya negosiasi damai atau dialog untuk menciptakan perdamaian untuk Suriah, hal ini terbukti dengan di undangya Indonesia oleh PBB untuk hadir dalam perundingan di Genewa untuk membahas penyelesaian konflik Suriah.

Sebelum perundingan Genewa I maupun II yang masih berlangsung hingga Februari 2014 Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan penyelesaian politik yang

terjadi di Suriah dengan cara negosiasi damai hal ini sebagaimana yang di lakukan Menlu Marty

Natalegawa ke Dewan keamanan PBB untuk membahas krisis yang terjadi di Suriah, Marty menegaskan, Indonesia akan berperan penting dalam pembahasan konflik Suriah dalam pertemuan kali ini. Indonesia berada dalam posisi mendesak penyelesaian politik, bukan dengan agresi militer dalam konflik Suriah.<sup>51</sup>

Ada 3 usulan yang diajukan pemerintah Indonesia kepada Suriah, yang pada akhirnya "Suriah menerima usulan Indonesia, pertama, hentikan kekerasan. kedua, bantuan kemanusiaan, ketiga proses politik yang transparan," Marty menuturkan Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem juga telah menghubungi dirinya yang mengonfirmasi kesediaan Suriah untuk menerima usulan Indonesia itu. "Kami tadi sudah berbicara dengan Menlu Suria melalui telepon isinya menindaklanjuti surat Presiden SBY kepada Presiden Assad yang dikirimkan beberapa waktu lalu. dan intinya menekankan pula kembali perlunya penyelesaian masalah Suriah diselesaikan melalui jalur politik damai dengan dialog dan beliau setuju dengan itu, Namun Marty menjelaskan, Pemerintah Suriah juga minta Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi untuk mewujudkan dan merealisasikan jalur damai terkait permasalahan yang terjadi saat ini.

Indonesia juga ikut andil dalam mengirimkan pimpinan delegasi indonesia yakni wakil menteri luar negeri Wardana pada pertemuan para menlu OKI ke-40 di Conarkry, Gunea, indonesia dalam pertemuan tersebut memberikan usulan agar mengedepankan dialog antar agama dan keyakinan untuk menunjukkan pada dunia bahwa islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi, indonesia menyerukan perdamaian dunia melalui solusi politik damai yang inklusif, bahkan presiden SBY selaku kepala negara dan pemerintahan telah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa " meski indonesia secara geografis tidak terletak di

---

<sup>51</sup> Lihat di : <http://news.liputan6.com/read/701753/video-bahas-konflik-suriah-menlu-marty-ke-dewan-keamanan-pbb/?related=pbr&channel=n> di akses pada (31,Oktober 2013)

timur tengah, tidak seperti Turki atau Iran yang berbatasan langsung, tapi indonesia peduli pada suriah, karena ada kewajiban moral dengan dua alasan : pertama karena indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan yang kedua karena amanat konstutisi UUD 1945. Presiden SBY juga aktif dalam menyerukan penyelesaian politik dengan wacana negosiasi damai di dalam fórum internasional G20 yang berlangsung di Suriah pada 2013, SBY menegaskan sikap indonesia yang menolak penyelesaian konflik Suriah dengan cara-cara kekerasan selain itu pada sesi debat hari pertama sidang ke-67 majelis umum PBB di markas PBB New York presiden Susilo Bambang Yudhyono juga menyerukan upaya penyelesaian dengan dialog dan menghentikan aksi kekerasan di Suriah.

Sikap Indonesia dalam krisis Suriah sangat jelas, menolak kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mendukung solusi damai yang mencerminkan aspirasi rakyat Suriah. Indonesia mendukung upaya PBB dalam mencari solusi damai dan menekankan perlu dilakukan suatu konferensi internasional yang bersifat inklusif untuk menyatukan pandangan masyarakat internasional dalam masalah Suriah. Indonesia pernah menarik Duta Besar di Suriah di awal tahun ini sebagai bentuk kecaman terhadap aksi kekerasan yang terus terjadi di negara tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia kembali mengirim Dubes Indonesia ke Suriah menyusul keberadaan personel TNI dan Polri yang tengah bertugas sebagai tim peninjau PBB di Suriah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka.

Indonesia tidak akan mengusir perwakilan Suriah di Jakarta, dengan keyakinan dalam situasi yang terus memburuk kedua negara justru harus mempertahankan komunikasi untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap Suriah, pemerintah Indonesia menunjukkan keprihatinan terhadap pembunuhan warga sipil yang terus terjadi dengan memanggil kuasa usaha

Suriah untuk Indonesia Bossam Al Khatib terkait tragedi Houla

Komisi I DPR menilai, pemerintah tidak tegas dalam mengambil kebijakan politik terhadap Suriah, Indonesia harus lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Negara timur tengah, sebagai Negara demokratis dan Negara berpenduduk islam terbesar, Indonesia dapat berperan penting dalam menyikapi perkembangan di Suriah. Melihat kekerasan sistemik yang berkelanjutan di Suriah Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap politik yang lebih tegas dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Arab untuk memberikan sanksi berat kepada Pemerintahan Bashar Al-Assad.

Pemerintah Indonesia memilih untuk berperan aktif dalam proses penghentian kekerasan dengan menjadi bagian dari tim peninjau PBB. Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang diminta PBB untuk mengirimkan tim pemantau ke Suriah. PBB menilai Indonesia memiliki tenaga yang kompeten mengawasi gencatan senjata antar dua pihak bertikai di Suriah. Saat ini ada 16 perwira Indonesia baik dari Kepolisian atau TNI yang bertugas sebagai pemantau di Suriah. Tim Pemantau PBB berjumlah sekitar 300 personel. dimulai dengan Tim Pendahulu yang terdiri dari 30 orang pemantau, termasuk 6 personel dari Indonesia. Kemudian Tim Pemantau PBB di tahap kedua akan diperkuat sehingga berjumlah 300 personel dari berbagai negara. dalam tahap kedua ini Indonesia pun tengah menyiapkan 10 personel tambahan.

Politik luar negeri tidak bisa di pisahkan dari politik domestic negara bersangkutan, hal ini di alami oleh setiap negara yang ada di permukaan bumi tanpa terkecuali Indonesia yang sangat di pengaruhi oleh mayoritas penduduk yang beragama islam pada isu-isu yang mendeskreditkan islam atau menyangkut keyakinan dalam bingkai keislaman, terbukti dengan beberapa kasus yang memperlihatkan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh islam dalam kebijakan luar negerinya adalah kasus pembantaian muslim rohingnya di Myanmar kasus ini

negerinya tanpa ada campur tangan dari negara luar karena telah di atur dalam piagam ASEAN.

Namun ketika umat muslim Rohingnya di Rakhine Myanmar mengalami penderitaan yang cukup berat maka respon masyarakat Indonesia yang di wakili oleh para ormas-ormas islam maupun pergerakan atau komunitas mahasiswa muslim Indonesia untuk mendorong pemerintah Indonesia segera ikut andil untuk menyelamatkan umat islam di Rakhine, Myanmar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kepentingan umat islam Indonesia yang di topang oleh faktor kemanusiaan.

Selain bukti di atas sampai saat ini dapat di lihat bagaimana kebijakan luar negeri terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina betapa Indonesia sangat konsisten terhadap solidaritas *ukhwah islamiyah* hingga saat ini Indonesia tetap menyalurkan bantuan materi maupun non-materi kepada Palestina yang berujung pada menjadikan Palestina sebagai negara yang merdeka di sisi yang lain jika di lihat kebijakan luar negeri Indonesia yang sangat di pengaruhi oleh factor islam adalah berbagai macam konflik yang terjadi di wilayah ASEAN yang melibatkan umat islam seperti yang terjadi di Filipina antara pemerintah Filipina dan kelompok minoritas muslim Moro yang bernaung dalam wadah *Moro National Liberation Front* (MNLF) menjadikan Indonesia sangat agresif dan berperan dalam upaya mengembalikan hak-hak umat islam yang minoritas dalam hal ini Moro di Filipina hal ini terlihat dalam upaya aktif

Indonesia dalam OJK untuk membahas konflik kedua belah pihak segera di atasi